BAB IV

ANALISIS STRATEGI PENYALURAN BANTUAN MODAL USAHA DALAM BENTUK PEMBIAYAAN *QARḌ AL-ḤASAN* PADA PROGRAM KOMUNITAS USAHA MANDIRI (KUM) DI YAYASAN DANA SOSIAL AL-FALAH (YDSF) SURABAYADALAM UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN

A. Mekanisme Penyaluran Bantuan Modal Usaha di Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Surabaya

Berbicara tentang kedermawanan, sesungguhnya hal itu sudah ada sejak berabad-abad yang lalu. Banyak kegiatan memberi pada orang lain dengan ikhlas yang dapat dikategorikan sebagai kedermawanan, baik itu berupa barang, tenaga dan kerelawanan, semuanya merupakan bagian dari kedermawanan. Sebelum melakukan penyaluran bantuan modal usaha lewat program Komunitas Usaha Mandiri (KUM), YDSF Surabaya terlebih dahulu melakukan pengumpulan/penghimpunan dana infak sebagai sumber pendanaan program KUM dari para donatur. Kegiatan ini sangat berperan dalam pelaksanaan program, karena dari kegiatan inilah YDSF dapat mengetahui besarnya potensi bantuan modal yang akan disalurkan.

Alur proses pelaksanaan pemberdayaan ekonomi umat mempunyai beberapa tahapan, yakni;

1. Pertama menyerahkan proposal kepada pihak pendayagunaan disertai administrasi. Sebelum mengajukan proposal, nasabah diharuskan mengisis formulir pendaftaran dan harus memiliki persyaratan sebagai berikut;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Nasabah harus sudah mempunyai usaha yang telah berjalan selama minimal 3 bulan;
b. Nasabah harus mempunyai kelompok minimal 5 anggota yang juga telah memiliki usaha;
c. Jika tidak mempunyai kelompok, maka harus ada karyawan YDSF Surabaya yang bersedia menanggungnya/menjaminnya;
d. Bagi yang pernah menjadi donatur di YDSF Surabaya, hanya dikenakan syarat pada point pertama.

Selain harus mempunyai persyaratan tersebut di atas, nasabah juga harus bersedia untuk memenuhi ketentuan-ketentuan selama menjadi anggota program KUM, antara lain;

a. Menjadi muslim/muslimah yang amanah
b. Setuju dan mematuhi peraturan
c. Mengikuti pengajian yang ada
d. Membayar tepat waktu
e. Jatuh tempo pembayaran setiap tanggal 20
f. Wajib menabung
g. Wajib menanam saham Rp. 100.000,- selama menjadi anggota.

2. Setelah itu pihak Yayasan Dana Sosial Al-Falah melakukan survei lokasi untuk memastikan kelayakan agar dana infak yang dipinjamkan sesuai dengan orang-orang yang benar-benar membutuhkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Setelah melakukan survei lokasi, Yayasan Dana Sosial Al-Falah menganalisa hasil survei tersebut, sampai pihak pengelola program KUM dapat mengambil keputusan.
4. Setelah diputuskan untuk menerima pengajuan bantuan yang telah diajukan, pihak pengelola program KUM membuat pengajuan anggaran.
5. Setelah proses pengajuan anggaran, dana bantuan dicairkan.
6. Setelah melalui beberapa tahapan sampai proses pencairan dana (uang), pihak Yayasan Dana Sosial Al-Falah melakukan pendampingan yang disertai pelatihan untuk para anggota pemberdayaan ekonomi umat dalam rangka memperkuat spirit bisnis para anggota yang telah ditekuni. Selain terdapat pelatihan spirit bisnis, di dalam pendampingan juga membahas tentang strategi untuk meningkatkan usaha dan omset, menyikapi dan menghadapi masalah usaha, cara pengelolaan keuangan, cara memperkuat spirit *enterpreneur*, dan cara mempersiapkan diri menjadi pribadi yang tangguh.[1]

Di bawah ini skema alur proses pelaksanaan pemberdayaan ekonomi umat menurut Yayasan Dana Sosial Al-Falah Surabaya:

[1] Ibu Menik, *Wawancara*, 18 Mei 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 1.4 Skema Alur Proses Pelaksanaan Pemberdayaan Ekonomi Umat

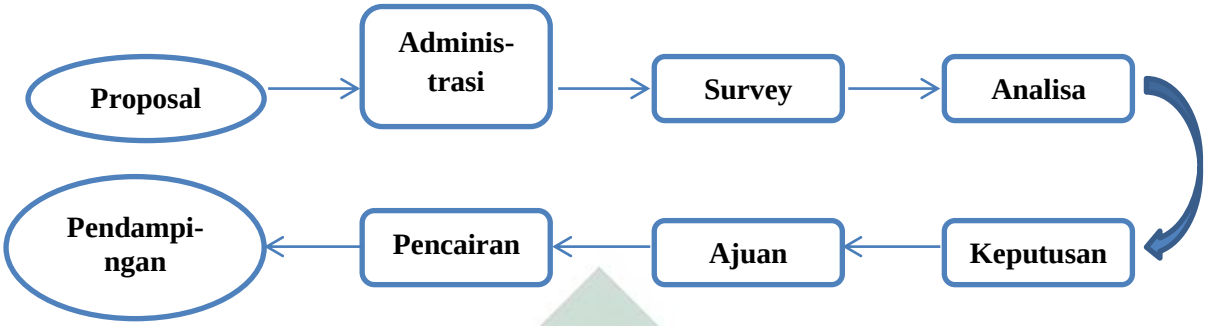

B. Analisis Strategi Penyaluran Bantuan Modal Usaha dalam Bentuk Pembiayaan *Qarḍ Al-Ḥasan* pada Program Komunitas Usaha Mandiri (KUM) di Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Surabaya dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan

Tujuan berzakat dan berinfak tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu menanggulangi dan mengentaskan kemiskinan. Menyantuni secara konsumtif dapat dikatakan pula sebagai pemberian bantuan sesaat, dalam hal ini bukan berarti bahwa dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) hanya diberikan kepada seseorang satu kali atau sesaat saja. Bantuan sesaat dalam hal ini berarti bahwa penyaluran kepada *mustaḥiq* tidak disertai target terjadinya kemandirian ekonomi (pemberdayaan) *mustaḥiq* melainkan diberikan untuk digunakan (dikonsumsi) secara langsung. Hal ini bukan kurang baik, namun kurang tepat jika sasarannya adalah orang yang masih produktif, dalam artian masih bisa diberdayakan, akan lebih tepat jika dana ZIS seperti ini diberikan kepada *mustaḥiq* yang tidak mungkin lagi mandiri seperti pada diri para orang tua yang sudah jompo, orang dewasa yang cacat yang tidak memungkinkan ia mandiri. Zakat dan infak dapat pula berfungsi sebagai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

salah satu sumber dana sosial ekonomi bagi umat Islam. Artinya pendayagunaan zakat dan infak yang dikelola oleh LAZ tidak hanya terbatas pada kegiatan-kegiatan tertentu saja yang berdasarkan pada orientasi konvensional (kegiatan konsumtif), tetapi dapat pula dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi umat, seperti dalam program penanggulangan kemiskinan dan pengangguran dengan memberikan zakat atau infak produktif kepada mereka yang memerlukan sebagai modal usaha.[2]

Adapun strategi penyaluran bantuan modal usaha dalam upaya pengentasan kemiskinan adalah penyaluran bantuan modal usaha yang disertai dengan strategi untuk merubah keadaan penerima (lebih dikhususkan golongan fakir miskin) dan kondisi kategori *mustaḥiq* menjadi kategori *muzakki*. Target ini adalah target besar yang tidak dapat dicapai dengan mudah dan dalam waktu yang singkat. Oleh karena itu, penyaluran bantuan modal usaha harus disertai dengan pemahaman yang utuh terhadap permasalahan yang ada pada penerima. Apabila permasalahannya adalah kemiskinan, harus diketahui penyebab kemiskinan tersebut sehingga kita dapat mencari solusi yang tepat demi tercapainya target yang telah dicanangkan.

Lili Bariadi dalam bukunya "Zakat dan Wirausaha" menjelaskan bahwa ada tiga sifat penyaluran dana dalam pemberdayaan, yaitu hibah, dana

[2] Maulina Arofatiz Zahra, *Analisis Program Pemberian Dana Hibah Modal Usaha dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq (Studi Kasus pada Manajemen Distribusi BAZ Kota Mojokerto)*, (Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014), 4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bergulir *qarḍ al-ḥasan*, dan pembiayaan *muḍarabah*. Sifat pendistribusian ini dibedakan antara dana zakat dengan dana bukan zakat.[3]

Menurut Mufraini, pemberdayaan zakat identik dengan pola pendistribusian dana zakat produktif. Dana zakat yang didistribusikan secara produktif cenderung bersifat hibah, bukan pembiayaan. Artinya tidak boleh ada ikatan seperti *ṣaḥibul māl* dengan *muḍarib* dalam penyaluran zakat. Sedangkan untuk dana bergulir *qarḍ al-ḥasan*, dan pembiayaan *muḍarabah* dilakukan dengan menggunakan dana selain zakat. Hal ini dilakukan karena jika pemberdayaan zakat diterapkan dalam bentuk dana bergulir *qarḍ al-ḥasan* dan pembiayaan *muḍarabah* masih menimbulkan polemik justifikasi legal syar'i sejumlah *fuqaha'*.

Oleh karena itu konsep pemberdayaan yang identik dengan distribusi produktif yang dikedepankan oleh LAZNAS YDSF Surabaya, dipadukan dengan dana selain zakat yaitu berupa dana infak/sedekah yang telah dihimpun. Hal ini meminimalisir adanya perbedaan pendapat akan pola produktif dana zakat, karena kategori penerima dana zakat telah ditentukan dalam Al-Qur'an dan Hadis yang mengacu pada delapan *aṣnaf*, sedangkan kategori penerima dana infak/sedekah lebih longgar daripada zakat, artinya distribusi infak/sedekah dapat diberikan kepada siapa saja yang membutuhkannnya. Seperti misalnya, masyarakat yang memiliki usaha kecil

[3] Lili Bariadi, et al., Zakat dan Wirausaha (Jakarta: CED, 2005), 85-56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mandiri yang kesulitan mendapatkan biaya modal usaha karena usaha yang dijalankan merupakan tumpuan hidup mereka satu-satunya.[4]

Hal tersebut dijadikan pedoman oleh YDSF Surabaya dalam mengoptimalkan pemberdayaan ekonomi masyarakat kalangan menengah ke bawah, sasaran utamanya adalah pengusaha kecil mandiri. Pemberdayaan masyarakat, dilakukan dalam bentuk bantuan modal usaha dengan akad *qarḍ al-ḥasan* yaitu suatu bentuk pinjaman yang menetapkan tidak adanya tingkat pengembalian tertentu (return /bagi hasil) dari pokok pinjaman. Program ini bertujuan untuk mengembangkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) melalui program Komunitas Usaha Mandiri (KUM). Dana yang dipinjamkan wajib dikembalikan dalam waktu sepuluh bulan dan apabila salah satu anggota kelompok tidak dapat memenuhi pembayaran, maka anggota yang lain berkewajiban menanggung beban anggota kelompok tersebut. Sejak tahun 2010 pembayaran angsuran dapat dilakukan melalui koordinator KUM di wilayah masing-masing, dan dana tersebut dikumpulkan oleh ketua kelompok setiap bulan.[5] Kewajiban dalam pengembalian dana pinjaman bertujuan menanamkan tanggung jawab kepada para *mustaḥiq* dan juga supaya dana infak/sedekah tidak habis dalam sekejap, sehingga dapat berputar untuk membantu *mustaḥiq* lainnya.

Adapun supaya program pemberdayaan KUM YDSF Surabaya benar-benar tepat sasaran, YDSF Surabaya memberikan pertimbangan yang matang

---

[4] M. Arief Mufraini, Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan (Jakarta: Kencana, 2006), 160-165.

[5] Diana, *Wawancara*, 18 Mei 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan memberikan beberapa persyaratan. Selain itu, YDSF juga melakukan survei kepada *mustaḥiq*. Survei tersebut meliputi pendapatan, rumah, dan bentuk usaha *mustaḥiq*. Hal itu merujuk pada undang-undang tentang pengelolaan zakat yang menyebutkan bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat dengan syarat kebutuhan dasar *mustaḥiq* telah terpenuhi. Kebutuhan dasar di sini meliputi kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan, dan kesehatan.[6] Jadi tujuan lain dilakukannya survei adalah meninjau lebih lanjut apakah semua kebutuhan dasar *mustaḥiq* telah terpenuhi, sehingga layak mendapatkan dana bantuan produktif.

Menurut Didin Hafidhuddin, LAZ yang mendistribusikan zakat yang bersifat produktif harus melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para *mustaḥiq* agar kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik. Disamping melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para *mustaḥiq* dalam kegiatan usahanya, LAZ juga harus memberikan pembinaan rohani dan intelektual keagamaannya agar semakin meningkatkan kualitas keimanan dan keislamannya.[7] Begitu juga dengan program KUM YDSF Surabaya yang tidak hanya memberikan bantuan pinjaman modal usaha tetapi juga memberikan pembinaan terhadap *mustaḥiq* serta memberikan bantuan motivasi moril berupa penerangan tentang fungsi, hak, dan kewajiban manusia dalam hidupnya yang pada intinya manusia diwajibkan beriman, beribadah, bekerja dan berikhtiar dengan sekuat tenaga, sedangkan hasil akhir

[6] Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 27 Ayat (2), 13.
[7] Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikembalikan kepada Allah SWT. Hal ini dilakukan dengan mengadakan pengajian umum (*Ta'lim*), diskusi keagamaan dan lain-lain selama dua kali dalam satu bulan, yaitu pada minggu pertama dan terakhir.

Maka dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk stategi Yayasan Dana Sosial Al-Falah Surabaya dalam kegiatan pemberdayaan ekonomi umat sebagai upaya pengentasan kemiskinan diantaranya:

a. Pemberian modal usaha bergulir

Memberi bantuan pinjaman uang untuk usaha kecil dengan cara memberi modal usaha yang akadnya harus dikembalikan dengan tiap bulan mengangsur tanpa adanya bunga akan tetapi pihak yang menerima pinjaman modal diusahakan berinfak semampunya.

b. Pendampingan usaha:

Pendampingan ini dilakukan setelah pinjaman itu sudah disalurkan tujuan pendampingan ini agar pihak peminjam dana infak sesuai dengan akadnya ada beberapa bentuk pendampingan antara lain:

1) Monitoring melalui supervisi dilakukan perpekan
2) Pelatihan-pelatihan (Interpreneurship, Produksi, Manajemen Keuangan, Manajemen Pemasaran dan Peningkatan Kapasitas Diri)
3) Taklim rutin komunitas dilakukan perpekan dan kelompok usaha mandiri atau pemberdayaan ekonomi umat YDSF dilakukan perbulan
4) Studi banding

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Evaluasi internal dan komunitas dilakukan perbulan dan dilakukan pertahun

Evaluasi ini digunakan agar setiap pinjaman itu perperiode bisa dilihat apakah pinjaman itu benar-benar membuahkan hasil, evaluasi ini digunakan perbulan dan dilakukan pertahun karena angsuran dilakukan perbulan jadi pihak Yayasan Dana Sosial Al-Falah Surabaya bisa mengetahui batas kemampuan peminjam apakah peminjam bisa mengangsur. Dan para pengusaha melakukan tutup buku dan bisa mengetahui apakah usahanya setahun ini benar-benar membuahkan hasil yang sesuai harapan.

Dalam mengukur sebuah pengaruh, penulis hanya menggunakan cara yang sangat sederhana yaitu dengan melihat data-data *mustaḥiq* yang telah menerima bantuan modal usaha dari YDSF Surabaya dan melihat kondisi atau pendapatan para *mustaḥiq* setelah dilakukan strategi penyaluran bantuan modal usaha dalam upaya pengentasan kemiskinan. Setelah melihat data-data yang ada lalu penulis mencoba menganalisa data sesuai dengan kondisi *mustaḥiq*.

Tabel 1.4 Data Kondisi Ekonomi *Mustaḥiq* KUM YDSF Surabaya

No.	Nama	Kondisi Ekonomi Setelah Mendapat Bantuan Modal dari YDSF			Ket
		Tetap	Membaik	Maju	
1.	Malik Fajar			√	
2.	Sadi		√		
3.	Nia Kurniati		√		
4.	Erma Nurmalia		√		
5.	Lilis Nuryani		√		
6.	Siti Nabsiyah	√			
7.	Holili		√		

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8.	Hartini	√			
9.	Eny Thoifah	√			
10.	Muhammad Amin		√		

Dari data di atas, hampir semua kondisi ekonomi *mustaḥiq* setelah mendapat bantuan modal usaha dari YDSF Surabaya membaik, bahkan ada yang mengalami kemajuan, dan hanya 3 orang saja yang kondisi ekonominya tetap. Jadi penyaluran bantuan modal usaha yang diberikan oleh YDSF melalui program KUM kepada 10 *mustaḥiq* bisa dikatakan mempengaruhi kesejahteraan mereka. Akan tetapi dalam hal ini penulis mencoba memahami dan menganalisa penyaluran bantuan modal usaha di YDSF Surabaya, antara lain :

1. Penyaluran bantuan modal usaha yang diberikan oleh YDSF Surabaya dapat membantu lembaga dalam upaya pengentasan kemiskinan.
2. Dengan adanya pemberdayaan ekonomi ini masyarakat bisa memajukan usahanya bahkan ada yang untuk memulai suatu usaha.
3. Setelah program ini masuk pendapatan masyarakat benar-benar berubah karena awalnya tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari menjadi bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari bahkan bisa membuka lapangan kerja bagi yang membutuhkan pekerjaan.
4. Latar belakang pendidikan para *mustaḥiq* yang kurang, berpengaruh pada bantuan modal usaha yang kurang signifikan.
5. YDSF menyamaratakan jumlah bantuan kepada mereka, padahal setiap *mustaḥiq* satu dengan *mustaḥiq* yang lainnya memiliki kebutuhan usaha

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang berbeda-beda. Oleh karena itu, peluang maju untuk *mustaḥiq* kurang maksimal.

6. Kurang optimalnya upaya "*monitoring*" dari YDSF terhadap *mustaḥiq* yang menerima dana pinjaman bergulir, dikarenakan masih ada *mustaḥiq* yang kondisi kesejahteraannya masih tetap.
7. Sejauh ini pengurus YDSF sudah cukup baik dalam memberikan pengarahan-pengarahan dan motivasi moril kepada *mustaḥiq*, terbukti bahwa *mustaḥiq* antusias dalam mengikuti rangkaian kegiatan pengajian dan pelatihan rutin setiap dua minggu sekali.

Disimpulkan bahwa dengan adanya program pemberdayaan ekonomi umat melalui penyaluran bantuan modal usaha dalam Komunitas Usaha Mandiri ini, mempunyai beberapa dampak negatif dan positif. Program ini mempunyai peran yang sangat penting bagi YDSF karena YDSF ingin menyalurkan dana infak ini kepada orang yang benar membutuhkan modal untuk memajukan usahanya. Dengan adanya program ini YDSF dapat meningkatkan ekonomi rakyat bahkan dapat mewujudkan tujuan pengentasan kemiskinan dengan merubah yang awalnya *mustaḥiq* menjadi *muzakki*.

C. Analisis Dampak Positif dan Dampak Negatif yang Ditimbulkan dari Strategi yang digunakan dalam Program Komunitas Usaha Mandiri (KUM) pada Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Surabaya Terkait Upaya Pengentasan Kemiskinan

Program KUM (Komunitas Usaha Mandiri) bertujuan memberikan bantuan modal usaha tanpa bunga kepada pengusaha kecil secara bergulir.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain itu, KUM juga dapat menjauhkan masyarakat dari riba, mendidik masyarakat gemar berinfak dan memberikan pendidikan agama dan keterampilan usaha yang bisa menghasilkan pendapatan tambahan bagi masyarakat.

Program KUM ini memiliki visi yaitu mengembangkan usaha kecil mandiri yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan misinya adalah membentuk karakter pengusaha yang religius dan bertanggungjawab dalam mengemban amanah serta mewujudkan masyarakat yang mandiri. Harapannya, program ini dapat meningkatkan ekonomi rakyat bahkan dapat mewujudkan tujuan pengentasan kemiskinan dengan merubah yang awalnya *mustaḥiq* menjadi *muzakki*.[8]

Sejauh ini menurut lembaga, program KUM telah memunculkan beberapa dampak bagi YDSF Surabaya sendiri dan masyarakat, baik berupa dampak positif maupun negatif.

1. Dampak Positif

Program KUM menimbulkan banyak dampak positif. Hal inilah yang membuat program ini tetap dipertahankan oleh lembaga, dan tetap diterima oleh masyarakat terbukti dengan banyaknya pengajuan bantuan yang masuk tiap bulannya. Pengaruh–pengaruh positif yang ditimbulkan antara lain;

a. Menjadikan masyarakat mandiri

[8] Rokhmad Hidayat, *Wawancara*¸Surabaya, 16 Mei 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Membantu masyarakat memajukan usahanya

c. Membantu masyarakat memulai usaha

d. Membantu masyarakat mencukupi kebutuhan sehari-hari

e. Masyarakat senantiasa mendapatkan ilmu baru dari kajian, pelatihan, seminar-seminar atau workshop dalam pendampingan.

f. Masyarakat menjadi bisa membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain[9]

Hal ini sesuai dengan tujuan lembaga dalam upaya pengentasan kemiskinan. Kesesuaian tersebut secara tidak langsung dapat disimpulkan apabila melihat pengertian miskin itu sendiri.

Menurut Supriatna, suatu penduduk dikatakan miskin bila ditandai oleh rendahnya tingkat pendidikan, produktivitas kerja, pendapatan, kesehatan dan gizi serta kesejahteraan hidupnya, yang menunjukkan lingkaran ketidakberdayaan.[10] Lebih lanjut lagi Emil Salim mengemukakan lima karakteristik penduduk miskin. Kelima karakterisktik penduduk miskin tersebut adalah: 1) Tidak memiliki faktor produksi sendiri, 2) Tidak mempunyai kemungkinan untuk memperoleh aset produksi dengan kekuatan sendiri, 3) Tingkat pendidikan pada umumnya rendah, 4) Banyak di antara mereka yang tidak mempunyai fasilitas, dan 5) Di antara mereka rata- rata

[9] Ibu Menik, *Wawancara*, Surabaya, 18 Mei 2017

[10] Tjahya Supriatna, *Strategi Pembangunan dan Kemiskinan*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000), h: 90

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berusia relatif muda dan tidak mempunyai keterampilan atau pendidikan yang memadai.[11]

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, dan melihat dampak yang ditimbulkan dari program KUM maka ditemukan titik temu yang mengarah pada tujuan lembaga dalam upaya pengentasan kemiskinan, yakni antara lain;

1. Masyarakat menjadi mandiri dengan usaha yang dijalankan, dengan demikian, salah satu karakteristik orang miskin, yakni tidak memilki faktor produksi sudah tidak lagi disandang.
2. Kesejahteraan sosial masyarakat tercapai, kebutuhan sehari-hari tercukupi, dan pendidikan anak-anak mereka terselamatkan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa program KUM dengan strategi-strategi yang dilakukan YDSF Surabaya dalam upaya pengentasan kemiskinan dapat terwujud. Namun masih belum menyeluruh dan optimal karena belum menyentuh masyarakat yang benar-benar awam, artinya belum pernah mempunyai usaha. Hal ini dikarenakan persyaratan program yang mengharuskan nasabah mempunyai usaha yang telah berjalan minimal tiga bulan. Mekanisme dan sistem penyaluran serta pemberdayaan dalam program ini juga masih menemui beberapa kendala jika melihat dampak negatif yang ditimbulkan, berikut penjelasannya;

[11] Ibid, 82

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dampak Negatif

Di samping dampak positif, sejak tahun berdirinya yakni sekitar tahun 2010, disimpulkan ada beberapa dampak negatif (resiko)/ kendala yang ditimbulkan dari adanya program KUM bagi YDSF Surabaya antara lain;

a. Pembayaran angsuran molor (macet)
b. Dana dipergunakan bukan untuk usaha, melainkan untuk membayar hutang
c. Pembayaran bermasalah, nasabah pindah domisili tanpa konfirmasi

Beberapa hal tersebut menurut hemat penulis dikarenakan kurang optimalnya upaya *monitoring* dari YDSF terhadap *mustaḥiq* yang menerima dana pinjaman bergulir. Oleh karena itu, agar hasil yang didapat oleh *mustaḥiq* mengalami peningkatan baik dalam skala kecil maupun besar, sehingga terhindar dari dampak-dampak negatif yang kemungkinan dapat terjadi, maka dibutuhkan evaluasi program kerja secara berjenjang mulai dari kelompok sasaran *mustaḥiq* dengan melibatkan berbagai pihak terkait yang terlibat. Dengan demikian akan diketahui dampak dari strategi yang digunakan dalam program yang telah dilaksanakan, sehingga dapat dijadikan rencana tidak lanjut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id